



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAKIP ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2020.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LAKIP) Tahun 2020, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 11 Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

Drs. AHMAD ANSAR, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730406 199203 1 002

ABSTRAK

Ditinjau dari aspek geografis, tofografis maupun demografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Potensi bencana yang dapat terjadi, antara lain, berupa Tsunami, Kecelakaan laut, Angin kencang, Erosi / Abrasi pantai dan banjir ataupun bencana non alam dan Sosial lainnya. Diantara berbagai potensi bencana yang ada, yang paling sering terjadi adalah terjangan angin kencang (angin puting beliung, abrasi, gelombang air pasang, dan kecelakaan laut). Kondisi dan dinamika demografis juga dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Bencana alam dimaksud telah menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya maupun pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Bencana alam dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi beban dan mengganggu jalannya roda pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan sendirinya harus dikelola dan ditangani secara baik melalui upaya terencana, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, dengan memberdayakan semaksimal mungkin potensi sumber daya lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar yang pembentukannya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan

pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”**,

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa kendala atau tantangan sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah.
- b. Sebagian besar wilayah yang berpotensi terjadi bencana
- c. Upaya Mitigasi Bencana yang belum memadai
- d. Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan belum terencana dengan baik
- e. Belum adanya masterplant penanggulangan bencana yang menyeluruh
- f. Masih rendahnya SDM Staf BPBD dalam manajemen penanggulangan bencana

Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang sebagai berikut :

- a. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana
- c. Adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun baik itu bersumber dari APBD, APBN (DAK) maupun anggaran dari BNPB
- d. Pelatihan SDM Untuk Peningkatan Keterampilan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum OPD	3
D. Isu – Isu Strategis	28
 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	30
B. Indikator Kinerja Utama	36
C. Rencana Kerja Tahunan	38
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	45
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	74
B. Analisis Capaian Kinerja	76
C. Realisasi Keuangan	78
 BAB IV : PENUTUP	
	96
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN

Tabel 1 : Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur 18

Tabel 2 : Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan
Penjenjangan 19

Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 19

Tabel 4 : Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan
Staf 19

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana 20

Tabel 6 : Peralatan Kebencanaan 21

Tabel 7 : Program Kegiatan Keuangan Tahun 2018 24

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 1 : Perjanjian dan Penetapan Kinerja tahun 2018....34

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 1 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Program 41

Tabel 2 : Realisas Anggaran Per Kegiatan 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Adapun tujuannya adalah untuk mengukur kinerja Bupati tahun 2020 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

C. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 73 tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Kepala Pelaksana, yang terdiri dari :
 - 1. Sekretaris unsur pelaksana terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Hukum , Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
 - 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi Kesiapsiagaan
 - 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - Seksi Kedaruratan
 - Seksi Logistik
 - 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - Seksi Rehabilitasi
 - Seksi Rekonstruksi
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonisasi Jabatan Unsur Pengarah Terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana adalah Jabatan struktural Eselon II-b yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah yaitu :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Menyenggarakan perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Menyenggarakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Menyenggarakan Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - f. Menyenggarakan pengelolaan keuangan;
 - g. Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III-b yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan , memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Badan.
 - Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

- b. Pengordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - d. Melaksnakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
 - e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Bidang-Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
 - i. Melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
 - Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. Melakukan pembinaan Sumber Daya manusia aparatur;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
4. Sub Bagian Hukum, perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.

- uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Melakukan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan sosialisasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
 - Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. Menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran;
 - d. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan;
 - e. Melakukan koordinasi terkait dengan tugas kebendaharaan;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
6. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

- Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
 - d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 7. Seksi pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan.
 - Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Pencegahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;

- c. Membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah permukiman akibat bencana;
 - d. Membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana;
 - e. Membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana;
 - f. Membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka Penanggulangan Bencana;
 - g. Membuat Peta Rawan Bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
 - h. Menyiapkan data potensi Penanggulangan Bencana yang dapat digunakan;
 - i. Menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem informasi Penanggulangan Bencana Indonesia;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pencegahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan.
- Uraian tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut, meliputi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;

- c. Melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba geladi tentang rencana kontijensi bencana;
 - d. Menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat maupun Satgas Penanggulangan Bencana;
 - e. Menyiapkan pos-pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitasi komunikasi;
 - f. Menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibat persiapan penyelamatan atau pengungsian;
 - g. Menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
9. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik terhadap Penanggulangan Bencana;
 - d. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik terhadap Penanggulangan Bencana;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan Penanggulangan Bencana;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

10. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan.

- Uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana;
 - c. Melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
 - d. Memberikan bantuan atau tindakan penanggulangan bencana;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

11. Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik.

- Uraian tugas Kepala Seksi Logistik sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
 - c. Melakukan pemeliharaan dan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
 - d. Melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana;

- e. Melakukan administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Logistik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

12. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap bencana;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
13. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi.
- Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi sebagai berikut, meliputi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
 - c. Menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasikan akibat bencana;
 - d. Merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana;
 - e. Merehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana;
 - f. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

14. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan.

- Uraian tugas Kepala Seksi Rekonstruksi sebagai berikut, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
 - c. Menyiapkan fasilitasi terhadap penanggulangan bencana;
 - d. Memberikan saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

SUMBER DAYA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi.

3. LINGKUNGAN STRATEGI

1. Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Potensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut

Tabel 1 :

Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No.	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Tk.I / IV b	1 Orang	S2	Kepala Badan
2.	Pembina / IV a	2 Orang	S1/S2	Kepala Bidang
3.	Penata TK. I / III d	6 Orang	S2/S1	Sekretaris,Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubag
4.	Penata / III c	3 Orang	S 1 / DIII	Kepala Seksi
5.	Penata Muda TK. I/IIIb	2 Orang	S 1	Kepala Seksi
6.	Penata Muda / III a	1 Orang	S1	Staf
7.	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang	SMA	Staf
8.	Pengatur / II c	1 Orang	SMA	Staf

9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	2 Orang	SMA	Staf
10.	Juru Tk I / I d	1 Orang	SMA	Staf
11.	-	87 Orang	S1, D II dan SMA	Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarela
Jumlah		107 Orang		

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

Tabel 2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	9 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		11 Orang

Tabel 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	12 Orang

3	II	4 Orang
4	I	1 Orang
5	PTT	87 Orang
Jumlah		107 Orang

Tabel 4

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Fungsional	-
5	Staf	6 Orang
Jumlah		20 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR	1 Unit	2011	√		

	BNPB					
2	Mobil Rescue Ford RDC STD Colt L 300	1 Unit 1 Unit	2011 2018	√ √		
3	Speed Boat	1 Unit	2009		√	
4	Kapal Laut Bermotor BPBD Dolphin Politilene	1 Unit 1 unit 2 unit	2010 2015 2016	√		
5	Motor Lapangan Trail Kawasaki LX	2 Unit 2 unit	2011 2016	√		
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017	√		
	JUMLAH	32 Unit				

Tabel 6
Peralatan Kebencanaan

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda Pengungsi	4 Peti	2011	√		
2	Tenda Dome/Tenda	5 Buah	2011	√		

	Keluarga					
3	Multi Purpose Solar Cell	13 Buah	2015	√		
4	Baju Pelampung	233 Buah 410	2008 2009 2015	√	√	
5	Pesawat telepon Rig2 M Band	1 Buah	2008			√
6	Tandu	2 Buah	2007	√		
7	Vellbad	160 Buah	2009 2016	√	√	√
8	Kantong Mayat	10 Lembar	2007/2008	√		
9	Selimut	20 Lembar	2008	√		
10	Field Bad BNPB	10 Buah	2011	√		
11	Tangga Aluminium/Katrol	2 Buah	2011			√
12	Tenda peleton	2 Buah	2011	√		
13	Tabung Pemadam Indoka	10 Buah	2011	√		
14	Tenda Posko	1 Buah	2011	√		
15	Tenda Regu	3 Buah	2011	√		
16	Tenda Keluarga BNPB	4 Buah	2011	√		
17	BNPB water treatment	1 Unit	2011	√		
18	Baju Anti Api/Foil	1 Buah	2011	√		
19	Chain Saw	1 Buah	2014/2017	√		

20	Garmin GPS	1 Buah	2014	√		
21	Sargon Alas Tenda	6 Lembar	2015	√		
22	Hoda Generation Set	1 Buah	2014	√		
23	Senter HiD Seachlight	1 Buah	2011	√		
24	RIG Pesawat Radio	1 Buah	2011			√
25	Handy Talky Icom	4 Buah	2009			√
26	HT ALINCO	15 Buah	2008			√
27	Faximili Panasonic	1 Buah	2011	√		
28	Light Lamp Senter Kepala	20 Buah	2011			√
29	Toa Mega Phone	1 Buah	2011	√		
30	Helm Standar	75 Buah	2011		√	√
31	Sony Handycam	1 Buah	2011	√		
32	Camera Digital	1 Buah	2010/2014 2017	√		
33	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2 Buah	2014	√		
34	Peralatan Deteksi Gempa	1 Unit	2015	√		

3. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp.2.187.632.734,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh

dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7

Program kegiatan keuangan tahun 2020

No.	JENIS BELANJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Belanja Tidak Langsung : - Belanja Pegawai			1.916.100.000,- 1.916.100.000,-
2.	Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal			2.187.632.734,- 519.000.000,- 1.566.490.734,- 102.142.000,-

		A. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 4. Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	151.500.000,- 10.000.000,- 209.000.000,- 580.851.590,-
		B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	48.500.000,- 15.000.000,- 18.000.000,- 109.000.000,- 30.000.000,-

		C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal	0
		D. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Lakip 4. Penyusunan Renja SKPD 5. Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6. Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP 7. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban 8. Pengelolaan Aset SKPD 9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	3.000.000,- 13.000.000,- 7.400.000,- 3.450.000,- 2.186.000,- 11.175.000,- 4.500.000,- 4.000.000,- 2.975.000,-

		E. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana 2. Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	33.330.000,- 0,-
		F. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	1. Pelatihan Relawan Bencana 2. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 3. Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana 4. Kordinasi dan konsultasi pengurangan risiko bencana 5. Sosialisasi kebencanaan 6. Pengurangan risiko bencana 7. Edukasi kebencanaan dan pemasangan rambu jalur evakuasi 8. Pelaksanaan Program desa/kelurahan tangguh bencana	0,- 53.642.000,- 35.522.000,- 13.501.144,- 25.450.000,- 85.523.000,- 10.697.750,- 73.254.250,-
		G. Rehabilitasi Pasca Bencana	1. Peninjauan dan assessment kerusakan dan kerugian	15.000.000,-

			masyarakat pascabencana	
			2. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	215.340.000,-
			3. Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	9.000.000,-
			4. Monitoring evaluasi dan pelaporan pada wilayah pasca bencana	5.000.000,-
		H. Penanganan korban darurat bencana	1. Penyediaan Dana Siap Pakai bagi Korban Bencana	230.000.000,-
			2. Pengkajian dan pendataan peristiwa bencana	15.000.000,-
			3. Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)	143.835.000,-

D. Isu – isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan

Seksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Masih lemahnya sistim pendataan/informasi
4. Alokasi anggaran yang belum memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana
5. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal :
 1. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana
 2. Jumlah aparatur belum mencukupi
 3. Sarana dan prasarana belum memadai
- 2) Faktor Eksternal :
- 3) Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
- 4) Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
- 5) Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Tahun 2005-2025 "*).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2016 - 2021. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Tangguh Menghadapi Bencana

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- c. Mewujudkan upaya mitigasi bencana secara menyeluruh.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

- Idealistik : Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan ke depan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi .
- Abstrak : Belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan sebagai berikut :

**Mewujudkan Perlindungan Masyarakat Dalam Upaya
Penanggulangan Bencana**

b. sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Menciptakan profesionalisme aparatur dalam penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kebencanaan
4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur penanggulangan bencana
5. Memulihkan keberdayaan ekonomi, infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat korban bencana

Tabel 1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan Perlindungan Masyarakat dalam upaya Penanggulangan Bencana	Menciptakan profesionalisme aparatur dalam penanggulangan bencana	Persentase Aparat yang Memenuhi Standar Kualifikasi	70%	75%	85%	90%	100%
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	80%	85%	90%	95%	100%
		Memulihkan keberdayaan ekonomi, infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat korban bencana	Persentase perbaikan rumah, fasilitas umum yang rusak akibat bencana	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatkan	Persentase ketersediaan sarana	50%	50%	70%	80%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		fasilitas dan infrastruktur penanggulangan bencana	prasarana kebencanaan					
			Persentase penanganan korban akibat bencana	75%	80%	90%	95%	100%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	Opini atas laporan keuangan	Memperbaiki Sistem dan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang bertanggung jawab, terbuka dan menjamin efektivitas dan efisien pemanfaatan anggaran.	RPJMD
			Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	RPJMD
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintah daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	RPJMD
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Meningkatkan ketersediaan fasilitas kerja	RPJMD
3.	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam (S-24)	Indeks lingkungan hidup	Program peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	RPJMD

C. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
 - d. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Lakip
 - d. Penyusunan Renja SKPD
 - e. Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - f. Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP
 - g. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban
 - h. Pengelolaan Aset SKPD

- i. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - a. Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana
 - b. Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana
- 6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam
 - a. Pelatihan Relaan Bencana
 - b. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
 - c. Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana
 - d. Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana
 - e. Sosialisasi Kebencanaan
 - f. Pengurangan Risiko Bencana
 - g. Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi
 - h. Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 7. Program Rehabilitasi Pasca Bencana
 - a. Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana
 - b. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana
 - c. Koordinasi dan konsultasi Penanganan Pasca Bencana
 - d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pada Wilayah Pasca Bencana
- 8. Program Penanganan Darurat Bencana
 - a. Penyediaan Dana Siap Pakai bagi korban Bencana
 - b. Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana
 - c. Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)

a. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan 8 Program dengan 36 kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Penetapan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian/ Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3

Perjanjian/Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Menciptakan profesionalisme aparatur dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Unit Layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.500.000,-
		10 Tabloid	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,-
		1 Tahun	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	209.000.000,-
		14 Layanan	- Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	580.851.590,-

	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	8 Unit 1 Unit 1 Unit 22 Unit 41 Unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	48.500.000,- 15.000.000,- 18.000.000,- 109.000.000,- 30.000.000,-
2. Meningkatnya Pelayanan SDM Aparatur dalam mengantisipasi bencana	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang difasilitasi	0 Orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: - Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,-
3. Meningkatnya Dokumen/Laporan BPBD Kepulauan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:	

selayar	Capaian Kinerja dan Keuangan	1Dokumen	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,-
		4Dokumen	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.000.000,-
		3Dokumen	- Penyusunan LAKIP	7.400.000,-
		1Dokumen	- Penyusunan Renja SKPD	3.450.000,-
		1Dokumen	- Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.186.000,-
		2Dokumen	- Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP	11.175.000,-
		12 Dokumen	- Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	4.500.000,-
		1Dokumen	- Pengelolaan Aset	4.000.000,-
		1Dokumen	- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	2.975.000,-

4. Meningkatnya Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	1 Paket Peralatan logistik 0 Dokumen	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana : - Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana - Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	33.330.000,- 0,-
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Alam	0 Orang 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Tahun 0 Orang 200 Pohon	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam: - Pelatihan Relawan Bencana - Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana Alam - Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana - Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Resiko Bencana - Sosialisasi Kebencanaan - Pengurangan Resiko Bencana	0,- 53.642.000,- 35.522.000,- 13.501.144,- 25.450.000,- 85.523.000,-

		1 Sekolah	- Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi	10.697.750,-
		4 Desa / Kelurahan	- Pelaksanaan Program Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	73.254.250,-
6. Memulihkan Keberdayaan ekonomi, Infrastruktur dan Fasilitas Umum Masyarakat Korban Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang difasilitasi	1 Dokumen	Program Rehabilitasi Pasca Bencana : - Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	15.000.000,-
		75 KK	- Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	215.340.000,-
		3 Kali	- Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	9.000.000,-
		1 Dokumen	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	5.000.000,-
9. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur penanggulanga	Persentase Penanganan Korban Darurat	77 KK	Program Penanganan Darurat Bencana: - Penyediaan Dana Siap Pakai Bagi Korban	230.000.000,-

n bencana	Bencana	35 Peristiwa Bencana	- Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	15.000.000,-
		80 Orang	- Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)	143.835.000,-

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

Dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020, hasil reviu dan

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan sebanyak 8 sasaran dan sebanyak 36 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 9 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 8 indikator
- Sasaran 7 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 8 terdiri dari 3 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

- I. Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya penanggulangan bencana :
 - a. Cakupan ketersediaan naskah kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- b. Persentase penurunan jumlah korban bencana yang mengalami kematian pada saat penanganan
 - c. Persentase penurunan resiko Bencana
- II. Peningkatan Pelayanan Penanganan Bencana
 - a. Respon Time Penanganan Korban Bencana
 - b. Indeks kapasitas Penanganan Bencana
- III. Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana.
 - a. Cakupan rehabilitas pasca Bencana
 - b. Cakupan rekonstruksi pasca Bencana

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2020 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 8 Program 36 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.103.732.734,- (Empat Milyar seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) termasuk belanja gaji pegawai. Adapun dana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana Dari 8 program dan 36 kegiatan. sebesar Rp.2.187.632.734,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

C. REALISASI KEUANGAN

Adapun Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp.3.896.338.793,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) termasuk belanja gaji pegawai (Realisasi 95,04%). Adapun target anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang dianggarkan sebesar Rp.2.187.632.734,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) Adapun realisasi keuangan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.2.049.454.405,- (Dua Milyar

Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) realisasinya (93,68%) untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM TAHUN 2020

NO	SASARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Menciptakan profesionalisme aparatur dalam penanggulangan bencana	951.351.590,-	936.656.203,-	96.51%
2	Meningkatkan Pelayanan dan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	220.500.000,-	220.475.050,-	99.99%
3	Meningkatnya Pelayanan SDM Aparatur dalam mengantisipasi bencana	0,-	0,-	0 %
4	Meningkatnya Dokumen/Laporan BPBD Kepulauan selayar	51.686.000,-	50.603.600,-	99.02%
5	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	33.330.000,-	15.430.600,-	46.30%
6	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	297.590.144,-	296.855.144,-	99.83%

7	Memulihkan Keberdayaan Ekonomi, Infrastruktur dan Fasilitas Umum Masyarakat Korban Bencana	244.340.000,-	244.263.590,-	99.88%
8	Meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana	388.835.000,-	285.170.218,-	75.13%

Tabel 2

REALISASI ANGGARAN PERKEGIATAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Unit Layanan	142.607.599,-	94.13%
		2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	10 tabloid	9.280.000,-	92.80%
		3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	208.955.738,-	99.98%
		4. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	14 layanan	575.812.866,-	99,13%

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	48.500.000,-	100%
		2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	1 Unit	15.000.000,-	100%
		3. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	1 Unit	17.994.000,-	99.97%
		4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	108.981.050,-	99,98%
		5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	41 Unit	30.000.000,-	100%
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang	0,-	0%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.000.000,-	100%
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	4 Dokumen	11.944.000,-	91.88%
		3. Penyusunan Lakip	3 Dokumen	7.400.000,-	100%

		4. Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	3.425.000,-	99.28%
		5. Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	2.185.000,-	99.95%
		6. Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP	2 Dokumen	11.175.000,-	100%
		7. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	12 Dokumen	4.500.000,-	100%
		8. Pengelolaan Aset SKPD	1 Dokumen	3.999.600,-	99.99%
		9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2.975.000,-	100%
5.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	1 Paket Peralatan Logistik	15.430.600,-	46.30%
		2. Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	0 Dokumen	0,-	0%
6.	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	1. Pelatihan Relawan Bencana	0 Orang	0,-	0%
		2. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1 Aplikasi	53.032.000,-	98.86%

	Alam	3. Pembuatan Data potensi Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	35.497.000,-	99,93%
		4. Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana	1 Tahun	13.501.144,-	100%
		5. Sosialisasi Kebencanaan	0 Orang	25.450.000,-	100%
		6. Pengurangan Risiko Bencana	200 Pohon	85.423.000,-	99.98%
		7. Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi	1 Sekolah	10.697.750,-	100%
		8. Pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	4 Desa/ Kelurahan	73.254.250,-	100%

7.	Memulihkan Keberdayaan ekonomi, Infrastruktur dan Fasilitas Umum Masyarakat Korban Bencana	Program Rehabilitasi Pasca Bencana :			
		1. Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	1 Dokumen	14.995.000,-	99.97%
		2. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	75 KK	215.310.500,-	99,99%
		3. Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	3 Kali	8.958.090,-	99.53%
		4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	1 Dokumen	5.000.000,-	100%
8.	Penanganan Darurat Bencana	1. Penyediaan dana Siap Pakai Bagi Korban Bencana	77 KK	146.474.968,-	63.68%
		2. Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	35 Peristiwa Bencana	10.930.500,-	72.87%
		3. Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)	80 Orang	127.764.750,-	88.83%

Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2020 dan dibandingkan dengan Perjanjian dan Penetapan Kinerja tahun 2020 , maka Capaian Kinerja Badan Peanggulungan Bencana Daerah tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	151.500.000,-	142.607.599,-	0
Output	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi dan Listrik	3 Unit Layanan	3 Unit Layanan	
Outcome	Persentase Jumlah Layanan Jasa Komunikasi dan Listrik	100 %	94.13 %	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.000.000,-	9.280.000,-	0
Output	Jumlah Bahan Bacaan yang Diadakan	10 Tabloid	10 Tabloid	
Outcome	Bahan Bacaan dan Koran	100%	92.80 %	

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	209.000.000,-	208.955.738,-	0

Output	Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan / diikuti	1 Tahun	1 Tahun	
Outcome	Persentase peningkatan kinerja organisasi	100%	99.98 %	

Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	580.851.590,-	575.812.866,-	0
Output	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	14 Layanan	14 Layanan	
Outcome	Persentase Peningkatan kinerja organisasi	100%	99,13 %	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	48.500.000,-	48.500.000,-	0
Output	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	
Outcome	Persentase Peningkatan Pengadaan Gedung kantor sampai dengan Kondisi baik	100%	100 %	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	15.000.000,-	15.000.000,-	0

Output	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	
Outcome	Persentase Peningkatan Gedung kantor sampai dengan Kondisi baik	100%	100 %	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	18.000.000,-	17.994.000,-	0
Output	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	
Outcome	Persentase Peningkatan kendaraan Mobil Jabatan Sampai dengan Kondisi Baik	100%	99,97 %	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	109.000.000,-	108.981.050,-	0
Output	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	
Outcome	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional sampai dengan Kondisi Baik	100%	98,98 %	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	30.000.000,-	30.000.000,-	0

Output	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	41 Unit	41 Unit	
Outcome	Persentase Peningkatan Peralatan Kantor sampai dalam Kondisi Baik	100%	100 %	

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	0,-	0,-	0
Output	Jumlah Peserta yang Dikirim	0 Orang	0 Orang	
Outcome	Persentase Peningkatan Kompetensi Tekhnis Pegawai	0%	0%	

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.000.000,-	3.000.000,-	0
Output	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD tersusun tepat waktu dan sesuai dengan SAP berbasis akrual	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	100 %	

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	13.000.000,-	11.944.000,-	0
Output	Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun tepat waktu dan sesuai dengan SAP berbasis akrual	4 Dokumen	4 Dokumen	
Outcome	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	91.88 %	

Penyusunan LAKIP				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.400.000,-	7.400.000,-	0
Output	Lakip tersusun tepat waktu dan sesuai dengan standar	3 Dokumen	3 Dokumen	
Outcome	Dokumen Lakip	100 %	100 %	

Penyusunan Renja SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.450.000,-	3.425.000,-	0
Output	Renja tersusun tepat waktu dan sesuai dengan standar	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Dokumen Rencana Kerja SKPD	100 %	99.28 %	

Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.186.000,-	2.185.000,-	0
Output	Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersusun sesuai dengan	1 Dokumen	1 Dokumen	

	standar			
Outcome	Dokumen Penyusunan Laporan Hasil Pelayanan Minimal (SPM)	100 %	99.95 %	

Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.175.000,-	11.175.000,-	0
Output	RKA/DPA tersusun sesuai dengan standar	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Dokumen RKA / RKAP, DPAP / DPAP	100 %	100 %	

Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.500.000,-	4.500.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	
Outcome	Hasil Persentase Dokumen Pertanggungjawaban SKPD	100 %	100 %	

Pengelolaan Aset SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.000.000,-	3.999.600,-	0
Output	Laporan Pelaksanaan Aset SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Terlaksananya kegiatan pengelolaan aset SKPD	100 %	100 %	

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.975.000,-	2.975.000,-	0

Output	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah tersusun sesuai dengan standar	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Dokumen Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah	100 %	100 %	

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	33.330.000,-	15.430.600,-	0
Output	Laporan hasil pendampingan	1 Paket Peralatan Logistik	1 Paket Peralatan Logistik	
Outcome	Logistik dan Peralatan	100%	46.30 %	

Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	0,-	0,-	0
Output	Laporan hasil Pengelolaan Logistik	0 Dokumen	0 Dokumen	
Outcome	Logistik dan Peralatan	0%	0 %	

6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam

Pelatihan Relaan Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	0,-	0,-	0

Output	Jumlah relawan yang sudah dilatih	0 Orang	0 Orang	
Outcome	Persentase relawan yang sudah dilatih dalam penanggulangan bencana	0 %	0 %	

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	53.642.000,-	53.032.000,-	0
Output	Aplikasi sistem informasi pelaporan dan pengaduan bencana (SIPANDA)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
Outcome	Masyarakat dapat mengupdate aplikasi sipanda	100 %	98.86 %	

Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	35.522.000,-	35.497.000,-	0
Output	Jumlah data potensi yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Tersedianya data potensi rawan bencana	100 %	99,93 %	

Sosialisasi Kebencanaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	25.450.000,-	25.450.000,-	0

Output	Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi kebencanaan	0 Orang	0 Orang	
Outcome	Persentase Masyarakat yang memiliki wawasan kebencanaan	100 %	100 %	

Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	10.697.750,-	10.697.750,-	0
Output	Rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul yang terpasang	1 Sekolah	1 Sekolah	
Outcome	Pengurangan risiko bencana	100%	100%	

Pengurangan Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	85.523.000,-	85.423.000,-	0
Output	Jumlah pohon yang dipangkas dan dibersihkan / dirapikan	200 Pohon	200 Pohon	
Outcome	Pengurangan Risiko Bencana Akibat Cuaca Ekstrem	100%	99.88 %	

Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	13.501.144,-	13.501.144,-	0
Output	Jumlah koordinasi dan konsultasi pengurangan risiko bencana	1 Tahun	1 Tahun	
Outcome	Pengurangan risiko bencana bagi masyarakat	100%	100%	

Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	73.254.250,-	73.254.250,-	0
Output	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	4 Desa / Kelurahan	4 Desa / Kelurahan	
Outcome	Terciptanya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	100%	100%	

8. Program Rehabilitasi Pasca Bencana

Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	15.000.000,-	14.995.000,-	0
Output	Laporan nilai kerugian bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Cakupan penanganan korban bencana melalui rehabilitasi pasca bencana	100%	99,97 %	

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	215.340.000,-	215.310.500,-	0
Output	Jumlah KK yang diberikan bantuan perbaikan rumah	75 KK	75 KK	
Outcome	Cakupan penanganan korban bencana melalui rehabilitasi pasca bencana	100%	99.99%	

Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	9.000.000,-	8.958.090,-	0
Output	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan	3 kali	3 Kali	

	Evaluasi Pasca Bencana			
Outcome	Cakupan penanganan korban bencana melalui rehabilitasi pasca bencana	100%	99,53%	

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	0
Output	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Cakupan penanganan korban bencana melalui rehabilitasi pasca bencana	100%		

8. Program Penanganan Daruran Bencana

Penyediaan Dana Siap Pakai Bagi Korban Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	230.000.000,-	146.474.968,-	0
Output	Jumlah Korban Bencana yang Dibantu	77 KK	77 KK	
Outcome	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100%	63,68 %	

Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	15.000.000,-	10.930.500,-	0
Output	Data Korban Bencana	35 Peristiwa Bencana	35 Peristiwa Bencana	
Outcome	Dokumen Data Korban Bencana	100%	72.87 %	

Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	143.835.000,-	127.764.750,-	0
Output	Jumlah TRC	80 Orang	80 Orang	
Outcome	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100%	88.83%	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang baru berdiri selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI

Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. MUH. BASLI ALI

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

ROSA INDAH HASAN, SP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP

Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Hj. HAMDANI, S.IP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDDIN S.Ap, M.Ap.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

SYAIFUL BAHRI, ST.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAENUDDIN, S. Sos.

Jabatan : Kasi. Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP.

Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Hj. HAMDANI, S.IP.

JAENUDDIN, S. Sos.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ROSA INDAH HASAN, SP.

ANDI LAPANG, SP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Dra. Hj. NURMIATI B



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAJA DEWI, S. Sos.

Jabatan : Kasi. Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

SYAIFUL BAHRI, ST.

RAJA DEWI, S. Sos.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REY RIVALDI ALFONS, ST.

Jabatan : Kasi. Rekonstruksi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

SYAIFUL BAHRI, ST.

REY RIVALDI ALFONS, ST.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAMUDDIN, S.Pd.

Jabatan : Kasubag. Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ROSA INDAH HASAN, SP.

ALAMUDDIN, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, SE.

Jabatan : Kasi. Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.AP, M.AP.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

BURHANUDDIN, S.Ap. M.Ap.

APRIANA USMAN, SE.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.

Jabatan : Kasi. Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.

SYAHRUL, SE.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI BAHARUDDIN, AMR.

Jabatan : Kasi. Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP.

Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Hj. HAMDANI, S.IP.

ANDI BAHARUDDIN, AMR.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana	Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana Alam	98 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Rp. 297.590.144,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD,

KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. PENCEGAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kalender dan Baliho yang didistribusikan kepada Masyarakat	1 Aplikasi
2.		Jumlah Data Potensi yang tersedia	1 Dokumen
3.		Pengurangan Resiko Bencana Bagi Masyarakat	1 Tahun
4.		Jumlah Pohon yang Dipangkas dan Dibersihkan/Dirapikan	200 Pohon

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Rp. 53.642.000,00	
2.	Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana	Rp. 35.522.000,00	
3.	Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana	Rp.13.501.144,00	
4.	Pengurangan Risiko Bencana	Rp. 85.523.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

**KABID. PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN,**

KASI. PENCEGAHAN,

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap.

SYAHRUL, SE.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah Peralatan dan Logistik Bencana yang Tersedia	98%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pemberian dana bantuan bagi korban bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana	98%

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 33.330.000,00	
2.	Program Penanganan Korban Darurat Bencana	Rp. 388.835.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD,

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

Hj. HAMDANI, S. IP.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. LOGISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah Bantuan Logistik dan Peralatan yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan pusat	1 Paket Peralatan Logistik
2.	Tersedianya Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah Peralatan Logistik Bencana disetiap SKPD terkait	1 Dokumen

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Rp. 33.330.000,00	
2.	Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	0	

Benteng, 04 Januari 2020

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

KASI. LOGISTIK,

Hj. HAMDANI, S. IP.

JAENUDDIN, S. Sos

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. KEDARURATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat atas Pemberian Dana Bantuan bagi Korban Bencana	Jumlah Pemberian Bantuan Stimulasi bagi Korban Bencana	77 kk
2.		Jumlah Pengkajian dan Pendataan Bencana yang Difasilitasi	35 Peristiwa Bencana
3.		Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC)	80 Orang

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Dana Siap Pakai bagi Korban Bencana	Rp. 230.000.000,00	
2.	Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	Rp. 15.000.000,00	
3.	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Rp. 143.835.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

KASI. KEDARURATAN,

Hj. HAMDANI, S. IP

ANDI BAHARUDDIN, AMR

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. REKONSTRUKSI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pasca bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana Melalui Rehabilitasi Pasca Bencana	1 Dokumen
2.		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana	3 Kali
3.		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	1 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peninjauan dan Assessment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	Rp. 15.000.000,00	
2.	Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	Rp. 9.000.000,00	
3.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	Rp. 5.000.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

KASI. REKONSTRUKSI,

SYAIFUL BAHRI, ST.

REY RIVALDI ALFONS, ST.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pasca Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang difasilitasi	85%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Pasca Bencana	Rp 244.340.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**KABID. REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI,**

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

SYAIFUL BAHRI, ST.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. REHABILITASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pasca bencana	Jumlah Rumah Masyarakat Pasca Bencana yang Diperbaiki	75 KK

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Rp. 215.340.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

**KABID. REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI,**

KASI. REHABILITASI,

SYAIFUL BAHRI, ST.

RAJA DEWI, S. Sos.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Masyarakat yang Terlatih	0 Orang
2.		Jumlah Masyarakat yang Mendapat Edukasi Kebencanaan	0 Orang
3.		Jumlah Siswa yang Terlatih	1 Sekolah
4.		Jumlah Desa yang Difasilitasi	4 Desa/ Kelurahan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelatihan Relawan Bencana	0	
2.	Sosialisasi Kebencanaan	Rp. 25.450.000,00	
3.	Edukasi kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi	Rp. 10.697.750,00	
4.	Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana	Rp. 73.254.250,00	

Benteng, 04 Januari 2020

**KABID. PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN,**

KASI. KESIAPSIAGAAN,

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap.

APRIANA USMAN, SE.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menciptakan Profesionalisme Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun
2.	Meningkatnya Pelayanan Usai Pakai Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	1 Unit
3.		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	22 Unit
4.		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	41 Unit
5.	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang
6.	Meningkatnya Dokumen/Laporan BPBD Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Standar Pelayanan SPM sesuai regulasi	1 Dokumen
7.		Laporan Aset SKPD	1 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rapat – Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 209.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.15.000.000,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 109.000.000,00	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 30.000.000,00	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	
6.	Penyusunan Standar Pelayanan SPM	Rp. 2.186.000,00	
7.	Pengelolaan Aset SKPD	Rp. 4.000.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

SEKRETARIS,

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**

ROSA INDAH HASAN, SP.

Dra. Hj. NURMIATI B

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBAG. KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menciptakan Profesionalisme Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah persediaan jasa komunikasi sumber daya, air dan listrik	3 unit Layanan
2.		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	10 Tabloid
3.		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dapat dipenuhi	14 layanan
4.	Meningkatnya Pelayanan Usai Pakai Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Kendaraan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat disediakan	8 Unit
5.		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	1 Unit
6.	Meningkatnya Dokumen/Laporan BPBD Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersedia	1 Dokumen
7.		Jumlah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	4 Dokumen
8.		Jumlah Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan yang sesuai regulasi	12 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 151.500.000,00	
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 10.000.000.00	
3.	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp. 580.851.590,00	
4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.48.500.000,00	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp. 18.000.000,00	
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.000.000,00	
7.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 13.000.000,00	
8.	Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	Rp. 4.500.000,00	

SEKRETARIS,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Benteng, 04 Januari 2020
KASUBAG. KEUANGAN

ANDI LAPANG, SP.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBAG. HUKUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Dokumen/Laporan BPBD Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersedia	3 Dokumen
2.		Jumlah Renja SKPD sesuai dengan Renstra dan RPJMD	1 Dokumen
3.		Jumlah Dokumen RKA/RKAP, DPA/DPAP yang tersedia	2 Dokumen
4.		Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang dibuat	1 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan LAKIP	Rp.7.400.000,00	
2.	Penyusunan Renja SKPD	Rp. 3.450.000,00	
3.	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP	Rp. 11.175.000,00	
4.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.975.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

SEKRETARIS,

**KASUBAG. HUKUM, PERENCANAAN
DAN PELAPORAN**

ROSA INDAH HASAN, SP.

ALAMUDDIN, S.Pd

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : SEKRETARIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menciptakan Profesionalisme Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	100 %
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Kendaraan	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
3.	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang difasilitasi	100 %
4.	Meningkatnya Dokumen /Laporan BPBD Kepulauan Selayar	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 951.351.590,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 220.500.000,00	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	
4.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 51.686.000,00	

Benteng, 04 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD,

SEKRETARIS,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

ROSA INDAH HASAN, SP.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya Kelestarian Hidup Sumber Daya Alam (S-24)	<div>1. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya penanggulangan bencana :<div>a. Cakupan ketersediaan naskah kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.</div><div>b. Persentase penurunan jumlah korban bencana yang mengalami kematian pada saat penanganan.</div><div>c. Persentase penurunan resiko bencana.</div></div> <div>2. Peningkatan pelayanan penanganan bencana :<div>a. Respon time penanganan korban bencana.</div><div>b. Indeks kapasitas penanganan bencana.</div></div> <div>3. Peningkatan pelayanan pasca bencana :<div>a. Cakupan rehabilitas pasca bencana.</div><div>b. Cakupan rekonstruksi pasca bencana</div></div>	78.7 %

Benteng, 04 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

L
A
M
P
I
R
A
N



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI

Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. MUH. BASLI ALI

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

ROSA INDAH HASAN, SP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP

Jabatan : Plt. Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Hj. HAMDANI, S.IP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDDIN S.Ap, M.Ap.

Jabatan : Plt. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Plt. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

SYAIFUL BAHRI, ST.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029

BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAENUDDIN, S. Sos.

Jabatan : Plt. Kasi. Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP.

Jabatan : Plt. Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. HAMDANI, S.IP.

JAENUDDIN, S. Sos.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Plt. Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ROSA INDAH HASAN, SP.

ANDI LAPANG, SP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B
Jabatan : Plt. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ROSA INDAH HASAN, SP.

Dra. Hj. NURMIATI B



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAJA DEWI, S. Sos.

Jabatan : Plt. Kasi. Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Plt. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI, ST.

RAJA DEWI, S. Sos.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REY RIVALDI ALFONS, ST.

Jabatan : Plt. Kasi. Rekonstruksi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Plt. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI, ST.

REY RIVALDI ALFONS, ST.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAMUDDIN, S.Pd.
Jabatan : Plt. Kasubag. Program
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROSA INDAH HASAN, SP.
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ROSA INDAH HASAN, SP.

ALAMUDDIN, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, SE.

Jabatan : Plt. Kasi. Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.AP, M.AP.

Jabatan : Plt. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BURHANUDDIN, S.Ap. M.Ap.

APRIANA USMAN, SE.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.

Jabatan : Plt. Kasi. Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.

Jabatan : Plt. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BURHANUDDIN, S.Ap, M.Ap.

SYAHRUL, SE.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029
BENTENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI BAHARUDDIN, AMR.

Jabatan : Plt. Kasi. Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. HAMDANI, S.IP.

Jabatan : Plt. Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. HAMDANI, S.IP.

ANDI BAHARUDDIN, AMR.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota	Rp. 45.815.000,00	
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 265.503.100,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,

Plt. KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. PENCEGAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemangkasan/ penebangan/ pembersihan pohon yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	250 Pohon

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	Rp. 195.113.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN,

Plt. KASI. PENCEGAHAN,

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap.

SYAHRUL, SE.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Pelaksanaan sosialisasi yang mendapat layanan informasi dan edukasi terkait rawan bencana	100 Orang
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelaksanaan pelatihan (perangkat desa/relawan bencana) yang mendapat pelatihan terkait kebencanaan	50 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	Rp. 45.815.000,00	
2.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Rp. 70.390.100,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN,

Plt. KASI. KESIAPSIAGAAN,

BURHANUDDIN, S. Ap, M.Ap.

APRIANA USMAN, SE.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana	100%

NO	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Rp. 19.897.300,00	
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp.305.420.800,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,

Plt. KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

Hj. HAMDANI, S. IP.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. LOGISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah bantuan logistik dan peralatan yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan BNPB	2 Paket bantuan logistik dan peralatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Rp. 19.915.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

Plt. KASI. LOGISTIK,

Hj. HAMDANI, S. IP.

JAENUDDIN, S. Sos

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. KEDARURATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Pemberian bantuan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30 Orang
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pengembangan personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih	30 Orang
3.		Pemberian bantuan stimulasi bagi korban bencana	60 KK
4.		Penanganan korban bencana	30 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan bencana	Rp. 19.897.300,00	
2.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Rp. 143.503.300,00	
3.	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Rp. 53.262.500,00	
4.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Rp. 88.740.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

Plt. KASI. KEDARURATAN,

Hj. HAMDANI, S. IP

ANDI BAHARUDDIN, AMR

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 684.278.100,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,

Plt. KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si

SYAIFUL BAHRI, ST.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. REHABILITASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah penanganan pascabencana yang terpenuhi	1 Tahun

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penanganan pasca bencana	Rp. 684.278.100,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI,

Plt. KASI. REHABILITASI,

SYAIFUL BAHRI, ST.

RAJA DEWI, S. Sos.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASI. REKONSTRUKSI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah penanganan pasca bencana yang terpenuhi	1 Tahun

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penanganan pasca bencana	Rp. -	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

Plt. KASI. REHABILITASI,

SYAIFUL BAHRI, ST.

REY RIVALDI ALFONS, ST.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan peningkatan kompetensi Teknis pegawai	Pelaksanaan pendiidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi melalui bimtek	3 Orang
2.	Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi yang dapat dipenuhi	Pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun
3.		Pelaksanaan penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	10 Tabloid
4.		Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun
5.	Penyediaan pengadaan barang milik daerah	Pelaksanaan penyediaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa komuniikasi, sumber daya air dan listrik	4 Unit layanan
7.		Pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun
8.	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 Unit
9.		Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	20 Unit
10,		Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22 Unit
11.		Pelaksanaan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 15.300.000,00	
2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.250.645.000,00	
3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp. 10.000.000,00	
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 235.635.000,00	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 21.500.000,00	
6.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 101.000.000,00	
7.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Rp. 269.160.000,00	
8.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 38.630.000,00	
9.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 135.450.000,00	
10.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 15.000.000,00	
11.	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 8.000.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS,

Plt. KASUBAG. UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

ROSA INDAH HASAN, S.IP

Dra. Hj. NURMIATI B

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBAG. KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD	1 Dokumen
2.		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun
3.		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
4.		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK dan Inspektorat	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 4.500.000,00	
2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 1.983.000.000.00	
3.	Koordiansi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp. 11.000.000,00	
4.	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Rp.4.000.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS,

Plt. KASUBBAG. KEUANGAN,

ROSA INDAH HASAN, S.IP

ANDI LAPANG, S.P.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KASUBBAG. PROGRAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2.		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
3.		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen
4.		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
5.		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen
6.		Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 4.199.000,00	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Rp. 2.071.000,00	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Rp. 2.071.000,00	
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Rp. 2.071.000,00	
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Rp. 2.071.000,00	
6.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 4.877.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS,

Plt. KASUBBAG. PROGRAM,

ROSA INDAH HASAN, S.IP

ALAMUDDIN, S.Pd

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : SEKRETARIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12 Dokumen
2.		Penyediaan laporan keuangan perangkat daerah	1 Tahun
3.		Pelaksanaan peningkatan kompetensi Teknis pegawai	3 Orang
4.		Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi yang dapat dipenuhi	1 Tahun
5.		Penyediaan pengadaan barang milik daerah	3 Unit
6.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun
7.		Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 21.860.000,00	
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1.998.100.000,00	
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 15.300.000,00	
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 250.645.000,00	
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 21.500.000,00	
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 370.160.000,00	
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 200.000.000,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,

Plt. SEKRETARIS,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.

ROSA INDAH HASAN, S.IP

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12 Dokumen
		Penyediaan laporan keuangan perangkat daerah	1 Tahun
		Pelaksanaan peningkatan kompetensi Teknis pegawai	3 Orang
		Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi yang dapat dipenuhi	1 Tahun
		Penyediaan pengadaan barang milik daerah	3 Unit
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun
		Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun
2.	Penanganan korban darurat bencana	Penyediaan pelayanan jasa informasi rawan bencana	1 Tahun
		Penyediaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Tahun
		Penyediaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Tahun
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30 Orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 21.860.000,00	
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1.998.100.000,00	
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 15.300.000,00	
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 250.645.000,00	
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 21.500.000,00	
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 370.160.000,00	
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 200.000.000,00	

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
8.	Informasi rawan bencana kabupaten / kota	Rp. 45.815.000,00	
9.	Pelayanan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota	Rp. 1.093.284.500,00	
10.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp. 161.917.500,00	
11.	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Rp. 19.897.300,00	

Benteng, 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ANSAR, M.Si.